

**INDONESIA'S URGENCY IN ADOPTING GOVERNMENT
REGULATION CONCERNING SMALLHOLDER-ENTERPRISE
PARTNERSHIP**

***KEBUTUHAN MENDESAK INDONESIA DALAM MENGADOPSI
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA ANTARA
PETANI KECIL DAN USAHA KECIL***

Oktavani Yenny¹, Putu George Matthew Simbolon^{2*}

¹Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat

^{2*}Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

*c.simbolon9@gmail.com

Volume 4, Number 2, September 2025

Received: April 30, 2025 Accepted: April 30, 2025 Online Published: October 3, 2025.

ABSTRACT

This research aims to provide a solution for the Indonesian Crude Palm Oil Smallholders so that they can play on the same level playing field and may acquire international market access. Such urgency exists since a conflict of interest exists between the Indonesian Ministry of Industry and the Ministry of Agriculture in efforts to regulate the KBLI 10431 sector regarding the CPO palm oil industry. In aiming for this purpose, this research is implementing the normative method through the implementation of Indonesian regulations related to industries, agriculture, and trades. This method is also implemented by applying the rules of international trade law. The article herein consists of two discussions involving Indonesia's domestic regulations and Indonesia's compliance with the World Trade Organization. The first discussion explains Indonesia's necessity to adopt regulations that accommodate the interests of the ministries of industry, agriculture, and trade. The second discussion explains Indonesia's urgency to adopt the government regulation therein due to the urgency in responding to unilateral environmental acts imposed by developed countries. From these discussions, this article recommends that the Indonesian government adopt a government regulation that may reconcile the conflicting interests within its executive branches. The article herein also stresses the urgency of adopting such a regulation to minimize Indonesia's climate litigation in the WTO Dispute Settlement Body.

Keywords : Crude Palm Oil, Smallholders; Non-Plantation PKS; World Trade Organization; Market Access.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi petani kecil kelapa sawit Indonesia agar dapat bermain di level yang sama dan dapat memperoleh akses pasar internasional. Urgensi tersebut muncul karena adanya benturan kepentingan antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian dalam upaya pengaturan sektor KBLI 10431 terkait industri kelapa sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode normatif melalui penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan industri, pertanian, dan perdagangan. Metode ini juga diterapkan dengan menerapkan aturan hukum perdagangan internasional. Artikel ini terdiri dari dua pembahasan yang melibatkan peraturan domestik Indonesia dan kepatuhan Indonesia terhadap Organisasi Perdagangan Dunia. Pembahasan pertama menjelaskan perlunya Indonesia mengadopsi peraturan yang mengakomodasi kepentingan kementerian perindustrian, pertanian, dan perdagangan. Pembahasan kedua menjelaskan urgensi Indonesia untuk mengadopsi peraturan pemerintah di dalamnya karena urgensi dalam menanggapi tindakan lingkungan sepihak yang diberlakukan oleh negara-negara maju. Dari pembahasan tersebut, artikel ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengadopsi peraturan pemerintah yang dapat mendamaikan benturan kepentingan dalam cabang eksekutifnya. Artikel ini juga menekankan urgensi mengadopsi regulasi semacam itu untuk meminimalkan litigasi iklim Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Kata Kunci : Minyak Sawit Mentah; PetaniKecil; Kelapa Sawit Non-Perkebunan; Organisasi Perdagangan Dunia; Akses Pasar.